



RISALAH KEBIJAKAN

Pusat Penelitian Kebijakan | Badan Penelitian dan Pengembangan dan Perbukuan
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan | 2020

<http://puslitjakdikbud.kemdikbud.go.id/>

PERSEPSI MASYARAKAT TERHADAP SEKOLAH FAVORIT

Setiap menjelang tahun ajaran baru dan setelah kelulusan peserta didik, maka akan diselenggarakan seleksi penerimaan peserta didik baru (PPDB). Saat PPDB tersebut, masih banyak masyarakat yang berkeinginan putra putrinya diterima di sekolah impian sesuai pilihan. Sekolah impian mereka, biasanya merupakan sekolah yang dianggap favorit karena sekolah itu sejak lama telah dipersepsikan sebagai sekolah yang bermutu oleh masyarakat (orangtua).

Secara formal, Kemendikbud tidak pernah memberi label atau predikat pada satuan pendidikan sebagai sekolah favorit. Istilah sekolah favorit muncul di kalangan dari masyarakat terhadap sekolah yang banyak peminatnya, dengan alasan beragam. Salah satu tipe sekolah yang masih dianggap favorit adalah sekolah unggulan dan eks sekolah Rintisan Sekolah Bertaraf Internasional (RSBI). Masyarakat menilai, bahwa sekolah-sekolah tersebut lebih mutu baik dibandingkan dengan sekolah lainnya. Kondisi ini menimbulkan ketimpangan serta dapat mematikan keberadaan sekolah-sekolah lain.

Untuk melihat sejauhmana persepsi masyarakat terhadap sekolah favorit ini, Pusat Penelitian Kebijakan Pendidikan dan Kebudayaan (Puslitjakdikbud), Balitbangbuk, Kemendikbud pada tahun 2019 telah melakukan kajian yang bertujuan untuk menganalisis persepsi masyarakat akan sekolah favorit dan merumuskan kebijakan yang terkait dengan hal tersebut.

Penelitian ini menggunakan metode survei dengan menyebarkan kuesioner secara online yang ditujukan pada SMAN eks RSBI dan orangtua siswa tersebut. Survei online dilakukan pada bulan Juni dan Juli 2019 terhadap 1.498 orangtua siswa dari 32 SMA eks RSBI di 15 provinsi dan 24 kab/kota. Pengumpulan data juga dilakukan melalui diskusi kelompok terpumpun (DKT/FGD) dengan pihak-pihak SMA baik negeri maupun swasta yang berdomisili di Jakarta, pihak PGRI, Forum Serikat Guru Indonesia (FSGI), peneliti LIPI, akademisi perguruan tinggi, Direktorat Pembinaan SMA Ditjen Dikasmen, serta PDSPK Kemdikbud.



MENURUNNYA INTENSITAS BELAJAR MENGAJAR

Berbagai pendapat mengatakan bahwa sekolah favorit merupakan sekolah yang memiliki peminat banyak, dan sekolah tersebut dijadikan pilihan pertama siswa, serta sekolah tersebut mampu mengedepankan output yang berkualitas dan berprestasi. Zainal (2014) menyebutkan bahwa sekolah favorit (*favourite school*) merupakan istilah lain dari sekolah yang efektif (*effective school*). Martono (2017) menyebutkan bahwa sekolah favorit adalah sekolah yang memiliki kemampuan finansial yang besar serta memiliki banyak siswa. Fuller (1987) menyebut bahwa tidak selalu benar anggapan yang menentukan keunggulan sekolah karena intake factor dari inputnya, yang meliputi karakteristik sosio ekonomik, ras, latar belakang keluarga, dan faktor materiil seperti ukuran kelas/sekolah, besarnya anggaran, perpustakaan, dan perlengkapannya. Jusuf Kalla (2018) mengatakan, sekolah yang hebat adalah jika sekolah tersebut bisa mengubah seorang siswa yang kurang pintar menjadi lebih baik dan pintar.

Berdasarkan hasil FGD disimpulkan, bahwa profil sekolah favorit adalah: (i) sekolah yang pernah memiliki predikat atau label seperti RSBI, Sekolah Unggulan, ditunjuk sekolah model dan lain-lain, memiliki warisan masa lalu dengan proses yang panjang (*history culture*), tidak dibuat asal ada anggapan sekolah favorit; (ii) sekolah yang memiliki kekhasan tersendiri misalnya berbasis agama atau lainnya; (iii) sekolah yang memiliki latar belakang ekonomi orang tua siswa menengah ke atas, kalangan tertentu, dengan latar belakang pendidikan tinggi; (iv) sekolah yang memiliki sarana dan prasarana yang memadai; (v) sekolah yang memiliki kerja sama yang baik dengan orang tua; (vi) sekolah yang dapat membangun budaya belajar baik sehingga siswa menjadi terdorong belajar lebih giat, (vii) sekolah yang dikelola dengan kedisiplinan yang tinggi untuk pendidik dan peserta didiknya, serta melaksanakan proses pembelajaran yang bermutu.

Namun demikian, jika dilihat dari segi mutu, tidak semua SMA favorit (eks RSBI) yang menjadi sampling memiliki nilai akreditasi lebih dari 90. Namun rata-rata capaian UN mereka cukup tinggi. Bahkan sebagian besar rata-rata SMA favorit dari sampling penelitian ini memiliki capaian rerata UN melampaui UN masing-masing provinsi. Tabel 1 menggambar hal tersebut.

Tabel 1 Capaian Rerata UN, Nilai Akreditasi, Rasio siswa/guru, Nilai UKG SMA eks RSBI

No	Provinsi	Sekolah	Capaian Rerata UN 2019*)		% Guru tersertifikasi	Rasio Siswa / Guru	Nilai Akreditasi
			IPA	IPS			
DKI Jakarta			53,14	68,55			
1		SMAN 28 Jakarta Selatan	84,62	82,19	78.05	18.44	95 (2015) A
2		SMAN 21 Jakarta Timur	80,38	79,89	66.67	17.47	95 (2018) A
3		SMAN 68 Jakarta Pusat	84,47	84,06	68.63	16.80	96 (2017) A
4		SMAN 78 Jakarta Barat	82,22	84,01	69.35	18.68	99 (2018) A



Jawa Barat		54,43	48,57			
5	SMAN 3 Bandung	80,43	68,44	82.14	18.38	97 (2018) A
6	SMAN 5 Bandung	74,07	63,38	71.15	22.75	99 (2015) A
7	SMAN 1 Bekasi	78,87	66,37	81.54	19.42	98 (2010) A
8	SMAN 1 Tasikmalaya	63,46	61,00	86.44	20.22	98 (2015) A
9	SMAN 1 Purwakarta	65,1	61,09	70.77	16.68	97 (2015) A
10	SMAN 1 Majalengka	66,35	59,6	79.10	19.01	87 (2016) B

Jawa Tengah		61,03	56,3			
11	SMAN 1 Semarang	74,97	73,9	98.63	17.63	98 (2017) A
12	SMAN 2 Semarang	72,83	72,58	85.14	17.55	97 (2017) A
13	SMAN 1 Temanggung	78,94	79,52	75.00	19.23	95 (2016) A

DI Yogyakarta		69,66	65,88			
14	SMAN 1 Yogyakarta	85,63	85,82	72.31	13.78	99 (2018) A
15	SMAN 2 Yogyakarta	80,41	83,31	88.24	17.47	98 (2018) A
16	SMAN 3 Yogyakarta	86,31	87,81	64.15	13.13	96 (2018) A
17	SMAN 5 Yogyakarta	77,3	80,81	90.20	15.76	96 (2018) A
18	SMAN 8 Yogyakarta	83,87	85,38	81.82	14.55	97,55 (2014) A

Jawa Timur		60,05	54,35			
19	SMAN 19 Surabaya	61,42	59,83	83.05	20.81	94 (2017) A
20	SMAN 21 Surabaya	67,41	69,6	85.11	20.38	93 (2017) A

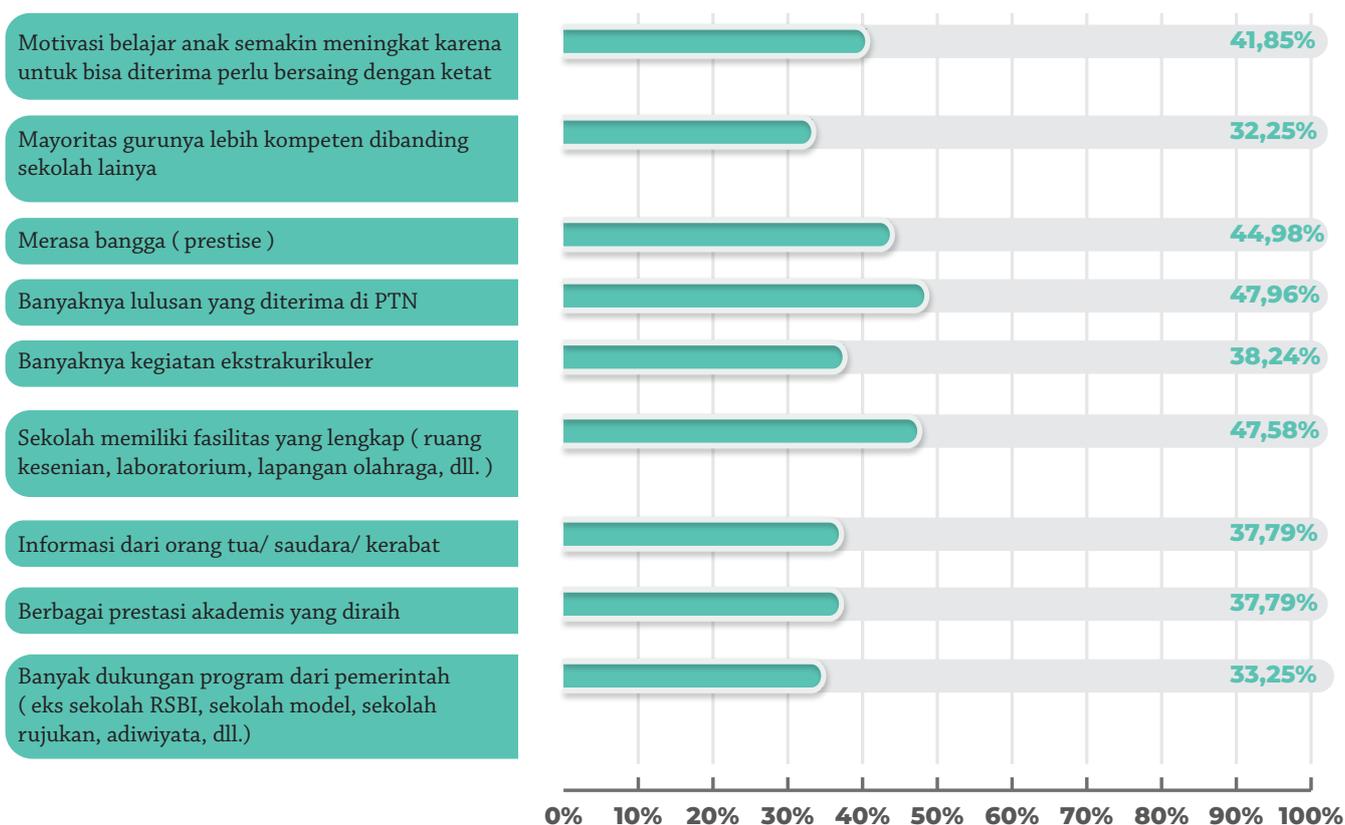
Bali		58,49	49,8			
21	SMAN 8 Denpasar	60,38	54,34	65.67	20.54	93 (2018) A
Aceh		43,15	39,04			
22	SMAN 2 Modal Bangsa	76,1	-	65.38	17.08	93.85 (2014) A
Sumatera Utara		47,78	43,18	65.38	17.08	93,85 (2014) A
23	SMAN 1 Matauli Pandan	72,08	63,68	67.12	16.71	97 (2016) A
24	SMAN 2 Balige	72,81	72,98	59.62	17.48	96 (2016) A
Sumatera Barat		55,29	48,57			
25	SMAN 3 Padang	69,57	68,26	75.00	17.00	93 (2017) A
Bengkulu		51,01	45,89			92,58 (2011) A
26	SMAN 2 Bengkulu	64,23	65,85	66.67	13.46	99 (2016) A
Sumatera Selatan		48,09	42,49	68.12	15.04	97 (2016) A
27	SMAN 17 Palembang	67,76	65,46	73.58	21.92	96,88 (2015) A
Lampung		50,92	45,46			
28	SMAN 9 Bandar Lampung	67,87	55,1	64.47	15.12	93 (2016) A
29	SMAN 5 Bandar Lampung	56,26	52,93	89.83	16.42	86 (2017) B
Kalimantan Timur		54,78	48,87			
30	SMAN 1 Balikpapan	78,23	68,94	68.18	18.70	98,50 (2014) A
Sulawesi Selatan		46,86	41,83			
31	SMAN 15 Makassar	46,38	40,34	79.07	20.23	93 (2018) A
NTB		47,46	43,41			
32	SMAN 1 Kota Bima	55,69	47,41	84.29	14.16	96 (2018) A

Sumber: Puspendik, Balitbang Kemendikbud (2019); Dapodik dan Sekolah Kita (Kemendikbud)

Dari survei yang dilakukan, orang tua sebagai masyarakat menganggap bahwa dari sisi pembiayaan sekolah dan jarak tempuh tidak menjadi pertimbangan utama dalam memilih sekolah. Namun lebih mengutamakan favorit tidaknya sekolah yang diminati siswa tersebut.

Selain itu, persepsi masyarakat terhadap sekolah yang dianggap favorit bukan karena prestasi akademis yang diraih atau banyaknya dukungan program dari pemerintah. Namun, alasan orang tua atau siswa memilih sekolah yang dianggap favorit adalah karena banyaknya lulusan yang diterima di PTN (47,96 persen), sekolah memiliki fasilitas yang lengkap (laboratorium, ruang kesenian, lapangan olahraga, dll.) sebesar 47,58 persen, disusul adanya rasa bangga atau prestise jika anak diterima di sekolah favorit (44,98 persen), berikutnya sekolah yang mampu memotivasi belajar anak semakin meningkat, karena untuk bisa diterima perlu bersaing dengan ketat (41,85 persen).

Grafik 1 Persepsi masyarakat terhadap sekolah yang dianggap favorit



Ini mengindikasikan bahwa sebagian besar orang tua dan siswa beranggapan dengan diterimanya di sekolah favorit, maka akan lebih menjanjikan untuk melanjutkan ke jenjang lebih tinggi yang menjadi idaman. Sebenarnya harus dipahami bahwa selama ini lulusan SMA tertentu yang sangat tinggi diterima masuk di SNMPTN, adalah karena ada faktor kuota dari Kemenristekdikti yang berbeda antara sekolah yang satu dengan sekolah lain.

UPAYA MENGHILANGKAN PERPSESI MASYARAKAT YANG BERLEBIHAN TERHADAP SEKOLAH FAVORIT

Pemerintah telah berupaya mengatasi fenomena labelisasi sekolah favorit tersebut dengan kebijakan sistem zonasi melalui Penerimaan Peserta Didik Baru yang diberlakukan sejak tahun 2017. Kebijakan ini diupayakan untuk mengurangi kesenjangan mutu antar sekolah dan dalam jangka panjang untuk meningkatkan pemerataan mutu pendidikan.

Pemberian kuota PTN hendaknya berdasarkan prestasi siswa dan bukan dari reputasi sekolah. Akreditasi sekolah belum menggambarkan mutu sekolah, sebaiknya menjadi koreksi bagi penyelenggara pendidikan untuk lebih meningkatkan sistem yang sudah dijalankan. Sistem zonasi tidak akan membuat sekolah-sekolah favorit itu punah, sebaliknya zonasi akan memacu pemerintah pusat dan daerah untuk meningkatkan kualitas tiap-tiap sekolah di tanah air tanpa terkecuali melalui fasilitas, pendanaan yang baik, kompetensi guru, kesejahteraan guru, kualitas proses pembelajaran, akses yang terbuka, dan *output* yang baik

REKOMENDASI

Pelaksanaan zonasi sudah berjalan 3 tahun, namun penerapannya perlu dukungan dan semua pihak. Jika ini berjalan dengan baik, maka sekolah-sekolah akan dapat memenuhi semua Standar Nasional Pendidikan (SNP) khususnya sarana dan prasarana serta pendidik dan tenaga kependidikan. Sekolah juga perlu mengevaluasi diri dengan menerapkan sepenuhnya Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) yang telah ditetapkan oleh Kemendikbud agar dapat meningkatkan mutu dan akuntabilitasnya.

Dalam rangka meningkatkan mutu sekolah, UN dapat terus dilaksanakan. Dalam hal ini, hasil UN tidak menjadi syarat kelulusan, melainkan untuk pemetaan pendidikan, sehingga pemerintah maupun masyarakat bisa membedakan mana sekolah bermutu dan yang tidak.

Dalam rangka pemerataan pendidikan, sangat diperlukan sinkronisasi tugas dan fungsi antara Pemerintah dengan Pemerintah Daerah sesuai kewenangannya. Undang-Undang Otonomi Daerah sangat jelas membatasi kewenangan masing-masing, namun kondisi tersebut justru membuat beberapa kebijakan di daerah tidak berjalan dengan baik, misalnya kebijakan pendidikan dasar (SD dan SMP) dikelola oleh Pemerintah Kabupaten/Kota dan pendidikan menengah (SMA/SMK) dikelola oleh pemerintah provinsi. Diperlukan pengaturan regulasi lebih lanjut ditingkat Peraturan Pemerintah mengenai pengelolaan pendidikan. Bahkan jika perlu merekonstruksi ulang undang-undang otonomi daerah atau undang-undang sistem pendidikan nasional.

Kebijakan zonasi harus terus dilaksanakan pada semua jenjang agar kesenjangan pendidikan dapat teratasi. Jika semua kesenjangan teratasi, masyarakat tidak perlu khawatir dengan pendidikan dan masa depan anaknya. Pelayanan pendidikan bermutu dapat dijangkau dengan mudah dari tempat tinggal. Kemendikbud melalui Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi sebaiknya tidak lagi menentukan penerimaan mahasiswa baru melalui jaringan undangan berdasarkan pertimbangan reputasi sekolah, namun berdasarkan reputasi peserta didik.

DAFTAR RUJUKAN

- Aqib, Zainal. 2014. Model-model, Media, dan Strategi Pembelajaran Kontekstual. (Inovatif). Bandung: Yrama Widya
- Martono, Nanang. 2017. Sekolah Publik Vs Sekolah Privat dalam Wacana Kekuasaan, Demokrasi, dan Liberalisasi Pendidikan. Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia
- Fuller, R. 1987, A Review, Probiotics in Man and Animals, Journal of Applied. Bacteriology 66, 365-378
- Jusuf Kalla, 2018. Pidato pengarahan dalam Rembuk Nasional Pendidikan dan Kebudayaan tahun 2018, Sawangan Depok, Jawa Barat, Indonesia

Risalah Kebijakan ini merupakan hasil dari penelitian/ kajian yang dilakukan oleh Pusat Penelitian Kebijakan pada tahun 2020 untuk informasi lebih lanjut dapat menghubungi:

Tim Penyusun :
Bambang Suwardi Joko
Catur Dyah Fajarini
Rahma Astuti

Pusat Penelitian Kebijakan
Badan Penelitian dan Pengembangan dan Perbukuan
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
Kompleks Kemdikbud, Gedung E, Lantai 19
Jl. Jenderal Sudirman-Senayan, Jakarta 10270
Telp. 021-5736365, 5713827.
website: puslitjakkidbud.kemdikbud.go.id.